

BISNIS INDONESIA DAN TANTANGAN PERDAGANGAN GLOBAL 2005

Perkembangan bisnis di Indonesia akhir-akhir ini, yang diharapkan mampu memperbaiki kondisi perekonomian bangsa dan kesejahteraan masyarakat dapat dijadikan awal yang baik bagi Indonesia dalam menghadapi perdagangan global di tahun 2005. Hal tersebut membawa implikasi pada pentingnya pemahaman dari para pelaku bisnis terhadap konsep dan teknik yang harus dipertimbangkan dalam bisnis yang dijalankan, sehingga pemahaman terhadap kondisi lingkungan lokal, regional dan internasional dapat diperbaiki. Pada tahun 2005, integrasi perekonomian negara-negara di Asia Tenggara dengan perekonomian global diperkirakan akan mendorong terjadinya integrasi perekonomian regional di wilayah tersebut. World Bank (2004) menginformasikan bahwa peningkatan ekspor dari negara-negara di Asia Tenggara secara langsung maupun tidak langsung juga telah berakibat pada peningkatan impor, karena interaksi global telah mengakibatkan peningkatan permintaan lokal terhadap produk-produk impor. Ditinjau dari segi perdagangan global, nilai neraca ekspor impor Indonesia pada tahun 2003 yang lalu masih positif (Rp 28,4 milyar) (WTO, 2004). Akan tetapi, meskipun pertumbuhan ekspornya masih lebih tinggi (7%/tahun) dibandingkan dengan pertumbuhannya impornya (4%/tahun), perubahan nilai ekspor Indonesia dinilai tidak signifikan, jika dibandingkan dengan beberapa negara lainnya, seperti RR Cina (34%/tahun), Korea Selatan (19%/tahun), Thailand (17%/tahun), Singapura (15%/tahun), Hong Kong (13%/tahun), dan Vietnam (22%/tahun) (Tabel 1).

Oleh:
E. Gumbira-Sa'id¹ dan G. Chandra Dewi²



¹ Guru Besar Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian dan Direktur Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor.

² Asisten Riset Manajemen Agroindustri, Magister Manajemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor.

Tabel 1. Daftar Beberapa Negara Eksportir dan Importir di Dunia, Tahun 2003

Peringkat	Negara	Nilai (USD milyar)	Persentase Perubahan (%)	Peringkat	Negara	Nilai (USD milyar)	Persentase Perubahan (%)
1	Jerman	748,3	22	1	Amerika Serikat	1303,1	9
2	Amerika Serikat	723,8	4	2	Jerman	601,7	23
3	Jepang	471,8	13	3	RR Cina	413,1	40
4	RR Cina	437,9	34	4	Inggris	390,8	13
5	Perancis	386,7	17	5	Perancis	390,5	19
6	Inggris	304,6	9	6	Jepang	382,9	14
7	Belanda	294,1	20	7	Italia	290,8	18
8	Italia	292,1	15	8	Belanda	262,8	20
9	Kanada	272,7	8	9	Kanada	245,0	8
10	Belgia	255,3	18	10	Belgia	235,4	18
	Hong Kong	228,7	13	11	Hong Kong	233,2	12
12	Korea Selatan	193,8	19	13	Korea Selatan	178,8	18
16	Singapura	144,1	15	15	Singapura	127,9	10
20	Malaysia	99,4	7	19	Australia	89,1	23
24	Thailand	80,5	17	21	Malaysia	81,9	3
26	Australia	71,5	10	22	Thailand	75,8	17
30	Indonesia	61,0	7	36	Filipina	39,5	6
37	Filipina	36,5	0	41	Indonesia	32,6	4
49	Vietnam	20,2	22	43	Vietnam	24,9	31

Sumber: WTO (2004)

Dalam pasar global, produk-produk manufaktur menempati prioritas utama perdagangan, dengan kontribusi mencapai lebih dari 74 persen dari total ekspor dunia. Dilain pihak, dengan kondisi global yang semakin membutuhkan kecepatan dalam hal jaringan interaksi dan komunikasi, produk-produk transportasi dan telekomunikasi juga menempati posisi yang sangat penting (di atas 38 persen). Meskipun sektor pertanian sangat berperan dalam hal penyediaan bahan baku produksi, tetapi perdagangan di sektor tersebut hanya memberikan kontribusi sekitar sembilan persen dari total perdagangan produk-produk di

pasar global (Tabel 2). Hal tersebut seyogianya menjadi sebuah gambaran bagi masa depan agribisnis di Indonesia, yang diharapkan dapat memperbaiki kinerja ekspornya dalam waktu mendatang.

Dalam beberapa dekade terakhir, kinerja ekspor Indonesia sesungguhnya belum menunjukkan perubahan yang berarti. Hal tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan beberapa negara lainnya, seperti RR Cina dan Thailand, yang telah mampu meningkatkan kontribusi ekspor komoditi-komoditi pertaniannya antara dua hingga tiga kali

Tabel 2. Perdagangan Ekspor di Dunia Berdasarkan Jenis Produk, 2003

Jenis Produk	Nilai (USD Milyar)	Persentase Perubahan (%)	Persentase (%)	
			1995	2003
Pertanian	674	15	11.7	9.2
Pertambangan	960	21	10.9	13.2
Manufaktur	5437	14	74.1	74.5
Mesin dan Peralatan Transportasi	2894	13	38.7	39.7
Tekstil	169	11	3.0	2.3
Pakaian	226	12	3.2	3.1
Produk-Produk Lain	644	15	8.6	8.8

Sumber: WTO (2004)

lipat dalam waktu sekitar 20 tahun. Pada tahun 2003 yang lalu, Indonesia menjadi negara pengekspor komoditi pertanian terbesar kesebelas di dunia, dengan total nilai ekspor mencapai Rp 9,94 milyar. Negara Asia lainnya yang memiliki kinerja ekspor komoditi pertanian yang cukup baik diantaranya adalah RR Cina Thailand, Malaysia dan India (Tabel 3). Dilain pihak, Indonesia memiliki peluang yang sangat baik untuk mengembangkan pasar ekspor komoditi-

komoditi pertanian ke negara-negara yang kebutuhan impornya untuk komoditi sejenis cukup tinggi, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, RR Cina, Kanada, Korea, Hong Kong, Saudi Arabia, dan sebagainya (Tabel 3).

Beberapa komoditi pertanian yang potensial dikembangkan untuk pasar ekspor diantaranya adalah daging karkas ke Singapura dan Malaysia; ikan hias ke Hong Kong, Korea

Tabel 3. Lima Belas Negara Pengekspor/Pengimport Komoditi-Komoditi Pertanian, Tahun 2003

Negara	Nilai (USD Milyar)	Kontribusi Terhadap Dunia (%)			
		2003	1980	1990	2000
Eksportir					
Uni Eropa	284.14	32.8	42.4	39.7	42.2
Amerika Serikat	76.24	17.0	14.3	13.0	11.3
Kanada	33.69	5.0	5.4	6.3	5.0
Brazil	24.21	3.4	2.4	2.8	3.6
RR Cina	22.16	1.5	2.4	3.0	3.3
Australia	16.34	3.3	2.8	3.0	2.4
Thailand	15.08	1.2	1.9	2.2	2.2
Argentina	12.14	1.9	1.8	2.2	2.1
Malaysia	11.06	2.0	1.8	1.5	1.6
Meksiko	9.98	0.8	0.8	1.7	1.5
Indonesia	9.94	1.6	1.0	1.4	1.5
New Zealand	9.60	1.3	1.4	1.4	1.4
Rusia	9.37	-	-	1.4	1.4
Cili	7.47	0.4	0.7	1.2	1.1
India	7.03	1.0	0.8	1.2	1.2
Importir					
Uni Eropa	308.87	42.9	47.1	40.5	42.8
Amerika Serikat	77.27	8.7	9.0	11.7	10.7
Jepang	58.46	9.6	11.4	10.5	8.1
RR Cina	30.48	2.1	1.8	3.3	4.2
Kanada	18.02	1.8	2.0	2.6	2.5
Rep. Korea	15.56	1.5	2.2	2.2	2.2
Meksiko	13.85	1.2	1.2	1.9	1.9
Rusia	13.73	-	-	1.5	1.9
Hong Kong	10.81	1.0	1.0	1.1	0.9
Taipei	7.96	1.1	1.4	1.3	1.1
Switzerland	7.12	1.2	1.3	1.0	1.0
Saudi arabia	6.26	1.5	0.8	1.0	0.9
Thailand	5.72	0.3	0.7	0.8	0.8
Indonesia	5.44	0.6	0.5	1.0	0.8
Turki	5.22	0.1	0.6	0.7	0.7

Sumber: WTO (2004)

Selatan, Amerika Serikat, RR Cina dan Malaysia; ikan tuna ke Jepang, Filipina dan Singapura; udang ke Jepang, Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Amerika Serikat dan Belgia; tanaman hias dan bunga potong ke Hong Kong, Taiwan, Belanda, Singapura, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, RR Cina, buah-buahan dan sayur-sayuran ke Singapura, Malaysia dan Jepang; tepung sagu ke Malaysia; kelapa dan produk-produk turunannya ke Singapura, Arab Saudi, Pakistan, Taiwan dan Malaysia; kopi dan produk-produk turunannya ke Amerika Serikat, Jepang, Korea, Singapura, Malaysia, dan Inggris; teh ke Australia, Jerman, Singapura, Taiwan, Malaysia, dan Inggris; rotan ke Hong Kong dan RR Cina; kelapa sawit dan turunannya ke India, Belanda, dan RR Cina; kakao ke Malaysia, Amerika Serikat, Singapura, Australia, Jepang, Filipina, Perancis, Belanda, Spanyol, dan Afrika Selatan; serta tembakau ke Amerika Serikat, Belgia, Malaysia, Rusia, dan Singapura.



Kinerja ekspor-impor Indonesia sebagai salah satu indikator dalam pembangunan perekonomian negara terkait dengan kondisi daya saingnya terhadap negara-negara lain. Berdasarkan teori daya saing Porter (Wild et al., 2004), daya saing suatu negara dalam suatu industri sangat tergantung pada kapasitas industri tersebut dalam melakukan inovasi dan perbaikan, yang pengukurannya dilakukan melalui empat elemen, yakni (a) kondisi faktor, (b) kondisi permintaan, (c) industri sejenis dan industri pendukung,

(d) serta strategi, struktur dan persaingan usaha. Dilain pihak, pemerintah juga memiliki peranan dalam perbaikan daya saing, terutama dalam bentuk kebijakan ekspor-impor maupun kebijakan-kebijakan lainnya yang diharapkan dapat melindungi industri maupun bisnis lainnya yang dijalankan di negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, pemerintah harus memposisikan diri sebagai katalis untuk memperkuat dan mendorong kinerja bisnis dan industri dalam mencapai daya saing yang lebih baik. Meskipun peranannya bersifat parsial, tetapi pemerintah memiliki

kedudukan yang kuat dalam menciptakan lingkungan bagi bisnis dan industri yang kompetitif. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar untuk meningkatkan daya saing nasional, dengan cara

mendorong perubahan, mempromosikan persaingan domestik serta merangsang inovasi. Kebijakan yang perlu diterapkan diantaranya meliputi penciptaan faktor-faktor yang akan menghasilkan keunggulan kompetitif, menghindari campur tangan dalam faktor dan pasar kurs, memperkuat standar produk, keamanan, dan lingkungan yang ketat, membatasi kerjasama langsung diantara para pesaing industri, mempromosikan tujuan yang mengarah pada investasi yang bertahan lama, melakukan deregulasi persaingan, menjalankan kebijakan antitrust domestik yang kuat, serta menolak pengaturan perdagangan (Choo dan Moon, 2003).

Tabel 4. Peringkat Daya Saing Beberapa Negara di Asia

Negara	Peringkat	
	2004	2003
Taiwan	4	5
Singapura	7	6
Jepang	9	11
Hong Kong	21	24
Korea	29	18
Malaysia	31	29
Thailand	34	32
RR Cina	46	44
India	55	56
Indonesia	69	72
Sri Langka	73	68
Filipina	76	66
Vietnam	77	60
Pakistan	91	73
Bangladesh	102	98

Sumber: WEF (2004)

Status perekonomian Indonesia sangat tergantung pada kondisi daya saing internasionalnya. Dengan menggunakan indeks daya saing pertumbuhan (Growth Competitiveness Index), yang meliputi elemen-elemen penyusun pertumbuhan ekonomi, yakni kualitas lingkungan makroekonomi, institusi publik, serta tingkat kepentingan penggunaan teknologi dalam pembangunan, posisi daya saing pertumbuhan Indonesia pada tahun 2004 berada pada peringkat ke-69, atau naik tiga peringkat dari posisinya pada tahun 2003 (peringkat ke-72). Oleh karena itu, posisinya masih jauh tertinggal di bawah tiga negara tetangga terdekat, yakni Singapura, Malaysia dan Thailand, yang pada tahun 2004 berhasil menempati posisi daya saing secara berurutan pada peringkat ke tujuh, ke-31 dan ke-34.

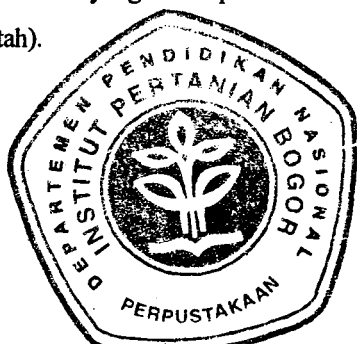
Sebagai negara yang statusnya masih berkembang, Indonesia memerlukan upaya yang lebih keras untuk bertahan di dalam pasar global yang sangat kompetitif, sehingga setiap pelaku bisnis di Indonesia seyogianya tidak hanya memfokuskan perhatiannya pada penggalian keunggulan komparatif dan kompetitifnya saja. Dalam hal ini, para pelaku bisnis di Indonesia seharusnya dapat mengadaptasi strategi yang diutarakan oleh World Bank (2005) dalam

hal memposisikan integrasi regional sebagai salah satu elemen dalam strategi liberalisasi unilateral, multilateral dan regional. Strategi liberalisasi unilateral berhubungan dengan program reformasi perekonomian domestik. Keberhasilannya dalam meminimalkan resiko perdagangan dan diversifikasi investasi serta meningkatkan perdagangan intraregional melalui penurunan biaya input, meningkatkan kompetisi dari impor menjadi pertumbuhan produktivitas serta mengintegrasikan perekonomian nasional ke dalam perekonomian global; telah dapat dilihat di beberapa negara, seperti Argentina, Brazilia, RR Cina (era 1990-an) dan India. Strategi liberalisasi unilateral tersebut telah berhasil dilakukan, sehingga dalam periode 1983 - 2003, tarif perdagangan yang diberlakukan di negara-negara berkembang mengalami penurunan hingga 21 persen, yang juga muncul sebagai dampak dari Perjanjian Uruguay (Uruguay Round). Dilain pihak, liberalisasi multilateral memunculkan reformasi perekonomian domestik dalam bentuk peningkatan akses ke pasar global. Strategi tersebut diduga memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara-negara berkembang dalam hal memberikan tekanan terhadap implementasi perluasan perdagangan di pasar-pasar terbuka, proteksi serta distorsi subsidi perdagangan untuk komoditi-komoditi dan produk-produk agribisnis.

Strategi ketiga, yaitu kebijakan open regionalism menjadi alternatif lain yang dapat dilakukan dalam mereformasi kebijakan perdagangan. Strategi tersebut memberikan dampak positif terhadap penurunan tekanan politik regional serta peningkatan skala ekonomis dalam pengadaan infrastruktur bisnis.

Untuk membantu meningkatkan kinerja bisnis, dana dari sektor perbankan pun diduga akan turut difokuskan pada pengembangan infrastruktur, yang diharapkan tidak hanya ditujukan

untuk pembangunan infrastruktur transportasi, energi dan telekomunikasi saja, tetapi juga untuk berbagai infrastruktur pendukung agribisnis, terutama yang berhubungan dengan fasilitas penyimpanan komoditas atau produk. Hal tersebut cukup mendasar, terutama sejak ditetapkannya target pertumbuhan perekonomian hingga 6,5% pada akhir tahun 2005 (Yudhoyono, 2004), serta dititikberatkannya sektor pertanian sebagai sektor prioritas utama. Dengan demikian, proses pembangunan secara berkelanjutan seyogianya dapat dilakukan secara seimbang antara pembangunan pertanian sebagai penyedia bahan baku utama (mencakup kegiatan budidaya serta akses produsen terhadap sumber-sumber penyedia input produksi di lini on-farm), industri manufaktur sebagai pengolah dan penghasil nilai tambah (off-farm), serta elemen-elemen pendukungnya (fasilitas infrastruktur, perbankan dan kelembagaan hukum yang mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah).



Arah pengembangan bisnis menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di atas seyogianya dilakukan dengan berpatokan pada visi untuk memperbaiki ekonomi golongan kecil dan menengah, yang selama ini memberikan kontribusi yang sangat penting, tidak hanya terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam mendukung

ke-sejahteraan masyarakat. Perbaikan-perbaikan tersebut harus dilakukan melalui peningkatan kinerja perekonomian yang aktif dan produktif, penciptaan kesadaran akan kehidupan berpolitik yang lebih mantap, peningkatan kepedulian sosial, serta pengembangan

diversifikasi bisnis komersial yang produktif, yang lebih ditujukan terhadap pengembangan bisnis kecil dan menengah. Berpedoman kepada rekomendasi hasil studi Tim ADB - SEARCA - Departemen Pertanian RI (2004), maka strategi-strategi yang seharusnya dijalankan adalah (a) melakukan percepatan pengembangan sumberdaya manusia (terutama yang memiliki jiwa kewirausahaan); (b) pencapaian modal sosial melalui desentralisasi, kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat (termasuk didalamnya perbaikan infrastruktur, pengembangan kapasitas bisnis, serta implementasi kebijakan teknologi informasi dan komunikasi), (c) melakukan revitalisasi produktivitas melalui riset dan pengembangan (diversifikasi) bisnis, (d) mendukung bisnis yang kompetitif dan efisien; (e) melaksanakan pertumbuhan dan perbaikan produktivitas ekonomi perdesaan; memperbaiki pengelolaan sumberdaya alam; serta (f) mengembangkan kapasitas manajerial, teknis dan kemampuan pelayanan di setiap level bisnis yang dijalankan.

Daftar Rujukan

- BPS (Badan Pusat Statistik).** 2004. Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor 2003. Jilid I. BPS. Jakarta.
- Cho, D.S. dan H.C. Moon.** 2003. From Adam Smith to Michael Porter: Evolusi Teori Daya Saing. Terjemahan. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Tim ADB - SEARCA - Departemen Pertanian RI (2004).** ADB TA No. 3843-INO: Agriculture and Rural Development Strategy Study. Strategy Paper. ADB - SEARCA - Deptan. Jakarta.
- WEF (World Economic Forum).** 2004. The Global Competitiveness Report 2004-2006. WEF di dalam <http://www.weforum.org>. (Diakses tanggal 30 Desember 2004).
- Wild, J.J., K.L. Wild dan J.C.Y. Han.** 2004. International Business: an Integrated Approach. Prentice Hall. New Jersey.
- World Bank.** 2004. Global Economic Prospect 2005 East Asia and the Pacific Regional Highlights. World Bank. Di dalam <http://siteresources.worldbank.org/INTGEP2005/Resources/EAPHighlightsENG.pdf> (diakses tanggal 27 Desember 2004).
- World Bank.** 2005. Global Economic Prospects: Trade, Regionalism and Development. World Bank. Swiss.
- WTO (World Trade Organization).** 2004. International Trade Statistics 2004. New York.
- Yudhoyono, S.B.** 2004. Revitalisasi Ekonomi Indonesia: Bisnis, Politik dan Good Governance. Cetakan Ketiga. Brighten Press. Bogor.